



■ JOGJA...

Sambungan dari hal 1

"Lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Penghargaan ini menjadi dorongan agar lebih tertib di segala bidang administrasi," ujar IP.

Selain itu, pemkot merupakan nominasi daerah terbaik dalam menyusun LKPD dari 16 pro-

vinsi, 3 kota, dan 4 kabupaten yang ikut bersama menerima penghargaan periode 2013.

Penyerahan penghargaan tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan perbaikan yang efektif.

Wawali mengatakan, penghargaan yang diterima untuk kali keempat secara beraturan

ini menjadi motivasi untuk menertibkan administrasi keuangan pemerintah. Menurutnya, penyajian laporan keuangan secara bertahap akan berganti dari berbasis kas menjadi berbasis aktual.

"Itu dapat memberikan gambaran lebih akurat terhadap kondisi keuangan pemerintah," jelasnya.

IP menyatakan, empat kali meraih capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bukan hal mudah. Untuk itu, dia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah punya komitmen kuat memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.



NOMOR EMPAT BERUNTUN: Wawali Jogja Imam Priyono menerima penghargaan dari Wapres Boediono di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta kemarin (12/9).

Dengan diraihnya predikat WTP, langkah pemkot menuju *good governance* (pemerintahan yang baik) akan semakin mudah dan terbuka. Itu didukung pegawai di jajaran pemkot untuk meyakini pakta integritas. "Selain itu, sistem pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan baik," jelasnya.

Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat menegaskan, berbagai usaha harus dilakukan untuk mempertahankan predikat WTP

yang sudah empat kali diraih selama empat tahun terakhir ini. Usaha itu tidak hanya mencakup SKPD.

"Kita juga akan mendampingi SKPD yang juga menjadi sampel dari BPK untuk menyajikan laporan keuangan SKPD secara benar," paparnya.

Predikat meraih empat penghargaan secara beruntun itu, tegas Imam, harusnya disertai dengan *zero case* atau tidak ada kasus penyimpangan penggu-

naan dana di pemkot. "Selama ini kan predikat WTP lebih ke administratif terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintah," ujarnya.

Tapi, ada hal lain yang perlu dicermati di masa depan. Yakni, pola seperti apa yang akan dimunculkan sehingga status WTP tidak hanya sekadar disiplin administrasi. "Status WTP mestinya juga membawa manfaat dalam menciptakan *clear government*," kata dia. (hrp/amd/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005